

Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama

A. Pendahuluan

Dialog dan kerukunan antarumat beragama merupakan dua proses komunikasi kerjasama antarumat beragama yang tidak dapat dipisahkan. Sebab, salah satu bagian dari kerukunan antarumat beragama adalah perlu dilakukannya dialog antaragama.

Pertemuan dialog zaman sekarang memang bukan pertemuan yang pertama, sebab sejak awal agama-agama, seperti Yahudi, Kristen dan Islam sudah saling bertemu. Ketika agama Kristen muncul berhadapan dengan agama Yahudi; ketika Islam muncul berhadapan dengan agama Yahudi dan Kristen, semua agama ini telah merangkul, bahkan berpolemik antara satu dan lainnya. Namun, untuk konteks sekarang, semua agama ditantang untuk memberikan kontribusi atas permasalahan etika global. Justru karena tantangan inilah, dialog antaragama dewasa ini mendapatkan basis pertemuannya. Dialog teologis menjadi dasar untuk etika, bukan hanya untuk perbincangan teologis itu sendiri.¹

Di Indonesia, dialog antar pemeluk berbagai agama pernah dilaksanakan pada tahun 1969. Dialog itu diprakarsai oleh pemerintah dan dihadiri oleh pemimpin agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Akan tetapi, usaha dialog ini tidak berhasil sebab ada satu hal yang tidak disetujui oleh Protestan dan Katolik, yaitu tentang saran bahwa “hendaknya penyiaran agama tidak ditujukan kepada orang-orang yang sudah beragama”, sehingga pertemuan atau dialog itu tidak menghasilkan perumusan sebagaimana diharapkan.²

Oleh : Khotimah, M. Ag

To reach religious harmony, each religious follower should understand his own religion and respect religious diversity. In a theoretical study, to appreciate religious diversity and religious differences, there are at least three approaches always used: theological, political, and socio-cultural approach. Furthermore, there are some basic principles implemented in an inter-religious dialogue. These principles could be from the norms of each religion or from personal experience of the religious follower either a direct experience or an experience based on understanding the phenomena of religious practices.

Keyword : Kerukunan, Agama, Plural (Harmony, Religion, Plural)

Dialog antarumat beragama di Indonesia, khususnya dialog Islam-Kristen mulai menemukan memontumnya pada masa Orde Baru. Momentum itu selain disebabkan munculnya perkembangan-perkembangan hubungan antaragama yang kurang kondusif pada masa pasca Soekarno, tetapi juga pilihan kebijakan politik pembangunan ekonomi yang ditempuh pemerintah Soeharto. Dialog-dialog antaragama itu bukan diprakarsai fungsionaris agama atau kalangan intelektual masing-masing, tetapi justru oleh pemerintah, khususnya melalui departemen agama.³

Masa pasca-Soekarno, hubungan antaragama, khususnya Islam-Kristen dapat

dikatakan sebagai salah satu dari masa puncak ketegangan. Hal ini dapat kita lihat dari terjadinya berbagai peristiwa konflik dan ketegangan di beberapa wilayah di Indonesia. Misalnya, peristiwa Meulaboh Aceh Barat, ketika umat Islam melakukan protes atas dibangunnya sebuah gereja di tengah-tengah perkampungan kaum muslimin yang tidak ada pemeluk Kristennya, tetapi golongan Kristen tidak mengacuhkannya, dan terjadilah peristiwa Meulaboh itu.⁴

Juga peristiwa Makassar yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1967, ketika sebuah gereja dilempari batu-batu. Suatu peristiwa yang diawali penghinaan oleh seorang pendeta Kristen Protestan kepada Nabi Muhammad, yang berkata kepada murid-murid yang beragama Islam pada suatu sekolah bahwa Muhammad adalah seorang pezina, seorang yang bodoh dan tolol, dan tidak pandai menulis dan membaca.⁵

Dari berbagai peristiwa konflik antaragama itulah, pemerintah mempunyai dua gagasan, yakni :

1. diadakan “Badan Kontak Antar-Agama”;
2. diadakan satu piagam yang ditandatangani bersama, yang isinya menerima anjuran Presiden, yakni agar pemeluk suatu agama yang telah ada janganlah dijadikan sasaran propaganda oleh agama lain.⁶

Dua hal tersebut menjadi suatu acuan dinegeri ini untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Dalam tulisan ini akan diungkap beberapa gagasan dan teori tentang pendekatan menuju kerukunan dan juga dialog.

B. Tiga Pendekatan Menuju Kerukunan

Dalam rangka kerukunan, setiap penganut agama sudah tentu harus

memahami agamanya dan menyadari pula keragaman dan perbedaan dalam beragama. Dalam kajian-kajian teoretis, untuk memahami keragaman dan perbedaan kepenganutan, paling tidak, terdapat tiga pendekatan yang sering digunakan: Pendekatan *teologis*, *politis* dan *sosial kultural*.

Pertama :Pendekatan *teologis* tiada lain adalah mengkaji hubungan antaragama berdasarkan sudut pandang ajaran agamanya masing-masing, yaitu bagaimana doktrin-doktrin agama “menyikapi” dan “berbicara” tentang agamanya dan agama orang lain. Adapun pendekatan teoretis melalui analisis politik dilihat dalam konteks “kerukunan”, dengan maksud untuk melihat bagaimana masing-masing (penganut) agama memelihara ketertiban, kerukunan, dan stabilitas suatu masyarakat yang multiagama. Sering kali istilah kerukunan mengandung pengertian bahwa kondisi sosial hubungan antarpenganut agama telah mengalami pertentangan atau konflik. Secara politis, konflik dapat diatasi. Salah satunya adalah melalui upaya rekonsiliasi antarpenganut umat beragama di Indonesia. Upaya-upaya politis untuk meredam terjadinya konflik memang pernah dilakukan. Akan tetapi, upaya untuk “menyadarkan” bahwa tiap-tiap agama membawa misi perdamaian dan keselamatan umatnya sering kali terabaikan. Kesadaran merupakan nilai universal dan hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia.

Oleh karena itu, proses “rukun” melalui upaya penyadaran dalam beragama dapat dilakukan melalui upaya penyamaan visi, pemahaman, dan kesadaran terhadap eksistensi agama-agama, yaitu setiap agama secara esensial memiliki nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh tiap-tiap pihak yang berbeda keyakinan. Melarang, berbuat jahat dan mengharuskan berbuat baik adalah salah satu nilai universal yang diajarkan oleh semua agama.

Dalam konteks hubungan antaragama, istilah rekonsiliasi paling tidak memberikan kesan atau pemahaman bahwa kehidupan beragama di Indonesia tidak harmonis dan sering menimbulkan konflik. Disebut “tidak harmonis” sebab kehidupan beragama yang selama ini damai, berdampingan, saling memahami, menghargai, dan menghormati satu sama lain terganggu oleh faktor-faktor tertentu, terutama oleh situasi kehidupan ekonomi, sosial, kultur, dan politik tempat agama-agama itu hidup dan berkembang. Adapun “konflik” menunjukkan bahwa di mana pun agama-agama itu berada, sekalipun situasi kehidupan sosial-politik stabil, tetap terjadi pertentangan. Hal ini dimungkinkan karena akar sejarah dan kultural di antara agama-agama itu sangat berbeda dan selalu menunjukkan dominasi perjalanan dan perkembangan agama itu.

Ketidakstabilan suatu negara atau masyarakat akan berdampak pula pada ketidakharmonisan, dan ketidakharmonisan yang berkepanjangan kemungkinan besar akan memunculkan permusuhan (konflik) yang setiap saat akan meladak menjadi pertentangan fisik. Tak heran, jika di suatu masyarakat atau negara terjadi pertentangan antaragama dan konflik berkepanjangan, tatanan, sistem, dan bangunan suatu masyarakat atau negara tersebut akan hancur.

Secara mendetail, faktor-faktor terjadinya ketidakharmonisan dan konflik antaragama pada umumnya hampir dapat diketahui, baik dari sisi teoretis maupun kenyataan praktis yang terjadi. Dari faktor-faktor itu, dapat diketahui, paling tidak, bahwa akar permasalahan terjadinya konflik antarumat beragama adalah tidak adanya kesadaran beragama yang bersumberkan dari ketidaktahuan atau kekurangpahaman terhadap agamanya sendiri, terlebih agama orang lain.

Oleh karena itu, sisi teoretis nilai-nilai esensial dan universalitas agama secara moral harus mendasari tindakan manusia dalam beragama. Nilai esensial tindakan manusia beragama akan muncul jika memiliki “kesadaran beragama”. Setiap manusia tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan keagamaan tanpa didasari oleh adanya kesadaran untuk melakukan tindakan-tindakan agama. Kesadaran beragama muncul dari pengetahuan, pengalaman, dan kebiasaan-kebiasaan melakukan introspeksi, re-evaluasi, dan relevansi tindakan-tindakan keagamaan dengan lingkungan sekitarnya. Apalah artinya pengetahuan tanpa kesadaran ataupun sebaliknya.

Sekalipun demikian, diperlukan adanya pelurusan pemahaman pandangan umum bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan atau intelektualitas dalam beragama memiliki tingkat ritualitas dan spiritualitas yang tinggi pula. Sebaliknya, orang yang dipandang kalangan awam tidak memiliki pengetahuan atau intelektualitas cemerlang dan menjalankan ritus secara alakadarnya tidak mempunyai tingkat spiritualitas yang tinggi.

Pandangan seperti itu tidak selamanya benar. Sosok seorang petani, misalnya, yang kesadaran eksistensial sebagai petani, bukan tidak mungkin lebih religius daripada sosok mahasiswa aktivis dakwah atau misi dan berteriak ke sana ke mari menyuarakan perdamaian, tetapi menyimpan rasa ingin di puji. Inilah barangkali yang dikemukakan oleh Schoun¹ bahwa dikarenakan agama lebih menekankan pada iman (*faith*), kebajikan, dan pengalaman ketimbang akal (*rasio*), manusia memiliki jiwa abadi untuk diselamatkan tanpa harus menjadi pandai. Sebaliknya, tidak setiap *pandai* dapat diselamatkan.

Disinilah, kita akan melihat bahwa

kerukunan tidak ada artinya kalau tidak didasari oleh pengetahuan, penghayatan, dan kesadaran agama, apalagi jika hanya mengandalkan pendekatan-pendekatan kelembagaan formal dan seremonial belaka, tanpa melihat nilai-nilai universal yang melekat pada diri manusia, seperti saling menyayangi, menghormati, cenderung pada nilai-nilai kebenaran, memahami dan menyadari perbedaan dan sebagainya.

Kedua : Pendekatan kultur atau budaya adalah untuk melihat dan memahami karakteristik suatu masyarakat yang lebih menitikberatkan pada aspek tradisi yang berkembang dan mapan, yaitu agama dihormati sebagai sesuatu yang luhur dan sakral yang dimiliki oleh setiap manusia atau masyarakat.

Tradisi “rukun”, menjadi simbol dan sekaligus karakteristik sebuah masyarakat yang telah berjalan sejak lama dan turun-temurun. Konsep “kerukunan hidup antarumat beragama”, misalnya, dapat dianalisis melalui pendekatan politis maupun kultural. Konsep ini lebih menitikberatkan muatan politis dan kulturalnya ketimbang teologis karena agama begitu nyata terlibat dalam dunia manusia yang tidak lepas dari kecenderungan politis dan kulturalnya.

Melalui kajian teologis, kita dapat memahami teks-teks setiap agama berkenaan dengan penyikapan agamanya dengan agama orang lain. Oleh karena itu, buku-buku yang ditulis oleh para ulama dan cendekiawan agama berkenaan dengan penyikapan agama-agama sangat membantu kita dalam memahami doktrin-doktrin agama berkenaan dengan hubungan antaragama. Apakah aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan sebagainya. Pendekatan “kerukunan” melalui dialog antartokoh agama, terutama pada masa-masa Orde baru sering dilakukan. Akan tetapi, kerukunan itu tetap terasa hampa. Sebab, yang ditekankan

oleh pemerintah pada waktu itu bukan aspek kesadarannya, tapi aspek stabilitasnya. Selama masa Orba, relatif tidak ada konflik antar pemeluk agama yang berbeda. Mungkin, orang mengira bahwa hal itu merupakan keberhasilan Orba dalam menerapkan konsep kerukunan. Namun, ketika era reformasi muncul, kasus Ambon, Aceh, Kupang, dan kasus-kasus lainnya yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, seperti berbagai kerusuhan dan tindakan kekerasan yang berbau agama, konsep kerukunan antarumat beragama kembali dipertanyakan. Boleh saja, kita menduga-duga bahwa keberhasilan menerapkan kerukunan umat beragama di Indonesia semasa Orde baru sejalan dengan kebijakan politis penguasa pada waktu itu, yakni stabilitas nasional demi berlangsungnya protes pembangunan nasional yang lebih menekankan pada pendekatan keamanan (*security approach*).

Oleh karena itu, perlu pengkajian ulang terhadap konsep kerukunan antar umat beragama yang selama ini diterapkan pemerintah. Ia tidak lagi hanya sebagai bungkus formal dari kenyataan pluralitas agama di Indonesia, tetapi harus menjadi motivator bagi terbentuknya kesadaran beragama dan berteologi di Indonesia. Jika tidak, konflik antaragama tidak dapat dihindarkan dan akan selalu meledak. Apabila hal ini terjadi, sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, baik aspek politis, ekonomi maupun sosial udaya akan hancur. Dengan demikian, kesadaran baragama dapat menjadi modal dasar menuju kerukunan antar kepengantuan agama, tetapi jauh dari itu adalah menanamkan kesadaran beragama. Sebab, menurut pemahaman saya, kesadaran ini menjadi nilai yang hakiki dari kemanusiaan universal.

Ketiga: Pendekatan politis, kita dapat melihat dari ideologi sebuah masyarakat atau

negara yang dimilikinya. Ideologi ini sangat memengaruhi hubungan tiap-tiap agama. Pada sebuah negara yang bertipe “demokratis” (umumnya di Barat), hubungan antaragama bersifat demokratis pula, tetapi lebih memiliki kecenderungan bahwa agama itu hanya milik individu dan bersifat internal. Sebaliknya, pada sebuah masyarakat yang tidak atau semidemokratis (umumnya di Timur), sosok agama cenderung bersifat inklusif, tiap-tiap umat beragama ingin menampakkan dan menonjolkan agamanya sebagai satu-satunya sumber semua aspek kehidupan manusia, tetapi sulit diwujudkan dalam praktik-praktik berbangsa dan bernegara karena berbenturan dengan agama lain dan tradisi atau budaya lainnya yang telah berkembang cukup lama.

Di Indonesia, teori yang diajukan oleh para agamawan (juga cendekiawan) terbatas pada dua aspek. *Pertama*, dari sisi ‘konsep kerukunan’, yakni pemaparan teologis tiap-tiap agama. *Kedua*, pada aspek ‘dialog’ antarcendekiawan yang diwujudkan dalam bentuk hubungan antarlembaga formal. Akan tetapi, hubungan antarlembaga formal ini baru bersifat seremonial, belum pada tataran konsepsional.

C. Prinsip-prinsip Dialog

Problem paling mendasar dalam kehidupan beragama dewasa ini – yang ditandai oleh kenyataan pluralisme – adalah “bagaimana teologi dari suatu agama mendefinisikan diri di tengah agama-agama lain.⁷ Oleh karena itu, berkaitan dengan semakin berkembangnya pemahaman mengenai pluralisme agama, berkembanglah suatu paham teologia religionum, yaitu suatu paham yang menekankan pentingnya dewasa ini untuk berteologi dalam konteks agama-agama.⁸

Oleh karena itu, diperlukan beberapa prinsip dasar dalam melakukan dialog antaragama. Prinsip-prinsip dasar ini dapat berasal dari norma masing-masing agama, bisa juga berasal atas dasar pengalaman pribadi dari manusia beragama, baik pengalaman langsung maupun pengalaman atas dasar memahami fenomena beragama.

Ismail R. Faruqi⁹, misalnya, memberikan norma-norma dasar supaya dapat berlangsung dialog antaragama. Dialog yang bukan hanya sekedar pertukaran informasi, seremonial, dan basi-basi, tetapi harus mempunyai sebuah norma keagamaan yang dapat mendamaikan berbagai perbedaan di antara agama-agama. Menurutnya Islam menemukan norma ini dalam *din al-fithrah*. Atas dasar norma ini, Islam memiliki teori yang sangat kuat sehubungan dengan agama Yahudi dan Kristen yang tidak dianggapnya sebagai “agama-agama lain”, tetapi sebagai dirinya sendiri. Persatuan agama Ibrahim: agama Yahudi, Kristen, dan Islam adalah berdasarkan konsep *hanif, din al-fithrah*, adalah suatu kemungkinan yang nyata.

Raimundo Panikkar¹⁰ memberikan norma-norma keagamaan yang dapat dijadikan pijakan dalam dialog atau, menurut pemahamannya adalah “perjumpaan agama harus benar-benar bersifat keagamaan”.

Pertama; “harus bebas dari apologi khusus”; Orang Kristen atau Budha atau penganut agama apa pun yang mendekati penganut agama apa pun yang mendekati penganut agama lain dengan gagasan *apriori* yang membela agamanya sendiri mungkin akan mendapatkan suatu pembelaan yang berharga dari agama tersebut, dan tentu saja tidak perlu menanggalkan kepercayaan dan pendiriannya. Hal ini bukanlah dialog agama, bukan perjumpaan, apalagi usaha saling menyumbang dan menyuburkan. Kita harus menghapus setiap sikap apologi kalau memang ingin bersungguh-sungguh

bertemu dengan penganut dari tradisi keagamaan yang lain. Bersikap apologi mempunyai tempat dan fungsinya sendiri, tidak dalam perjumpaan agama-agama.

Kedua; “harus bebas dari apologi umum”; Kita sangat memahami keresahan penganut agama modern yang menyaksikan gelombang “ketidakberagaman” dan bahkan “anti-keagamaan” sekarang ini, tetapi kelirulah kalau kita membangun semacam ikatan keagamaan yang didasarkan atas rasa takut dan khawatir ini. Sikap untuk menawarkan persekutuan umum bagi kaum agama untuk melawan ketidakpercayaan mungkin dapat dipahami, tetapi ini bukan sikap keagamaan, setidaknya menurut tingkat kesadaran keagamaan sekarang.

Ketiga; “berani menghadapi tantangan pertobatan”; Supaya perjumpaan itu bersifat keagamaan, ia harus taat secara penuh pada kebenaran dan terbuka pada realitas. Memasuki medan yang baru: “perjumpaan agama-agama mengandung tantangan dan resiko”. Ia harus sadar bahwa kemungkinan akan kehilangan suatu keyakinan khusus atau bahkan agamanya sendiri. Ia masuk tanpa senjata dan bersedia untuk ditobatkan sendiri. Ia dapat kehilangan hidupnya dapat juga dilahirkan kembali.

Keempat: “dimensi historis penting tetapi tidak mencukupi”. Agama bukan sekedar *privatsache*, juga bukan sekedar suatu “hubungan” vertikal dengan Yang Mutlak, melainkan pertalian juga dengan umat manusia. Agama mempunyai tradisi, mempunyai dimensi historis. Perjumpaan agama bukan semata-mata pertemuan dua atau lebih orang dalam kapasitasnya sebagai individu-individu pribadi belaka, terpisah dari tradisi agama masing-masing, tetapi ia mewakili orang-orang lain dari suatu komunitas, dari suatu tradisi keagamaan yang hidup. Oleh karena itu, perjumpaan agama bukanlah perjumpaan para ahli

sejarah, melainkan suatu dialog yang hidup, suatu medan untuk pemikiran kreatif dan jalan-jalan baru yang imajinatif, yang tidak memutuskan hubungan dengan masa lampau, melainkan meneruskan dan memperkembangkannya.

Kelima: “bukan sekedar kongres filsafat”. Tak perlu diragukan bahwa tanpa tingkat filsafat tertentu, tak mungkin ada perjumpaan. Sekalipun demikian, dialog keagamaan bukanlah sekedar pertemuan para filsuf untuk membicarakan masalah-masalah intelektual. Agama jauh dari sekedar ajaran-ajaran. Mempersempit agama menjadi hanya seperangkat ajaran tertentu yang terbatas sama saja dengan membunuh agama itu sendiri. Sikap pemahaman atau tafsiran dari suatu tradisi haruslah cocok, paling tidak, secara fenomenologis, dengan tafsiran dari dalam, yaitu dari sudut pandang penganutnya sendiri. Misalnya, menyembah seorang penyembah berhala sebagaimana umumnya dipahami dalam konteks Yahudi-Kristen-Islam, daripada mulai dengan apa yang jadi anggapan si penganut itu sendiri, adalah melanggar aturan tersebut.

Keenam: “bukan sekedar simposium teologis”. Perjumpaan agama bukanlah sekedar usaha untuk membuat orang luar memahami maksud kita. Akan tetapi, yang lebih penting adalah meresapi lebih dahulu apa yang akan ditafsirkan mendahului setiap penjelasan (yang kurang lebih masuk akal). Misalnya, menyamakan konsep *Brahman* dalam Upanisad dengan ide Yahweh dalam Alkitab, jelas keliru. Kendatipun demikian, tidaklah memuaskan untuk berkata bahwa kedua konsep tersebut tidak mempunyai kesamaan apa pun. Oleh karena itu, diperlukan pengertian *homologi*, bahwa keduanya tidak memiliki hubungan langsung, keduanya tidak dapat saling diterjemahkan, tetapi keduanya homolog, masing-masing memainkan peran yang

serupa. Keduanya menunjukkan pada suatu nilai tertinggi maupun suatu pengertian yang mutlak. Jelas, bahwa metode homologi tidak mengimplikasikan bahwa sistem yang satu lebih baik daripada sistem lainnya. Metode ini hanya menyingkapkan adanya pertautan homologis.

Ketujuh: “bukan sekedar ambisi pemuka agama”. Setiap dialog antaragama dapat terjadi dalam tingkat yang berbeda-beda dan tiap tingkat memiliki kekhasannya sendiri. Pertemuan resmi di antara wakil-wakil kelompok agama sedunia sekarang ini merupakan suatu tugas yang tidak dapat dielakkan. Pertemuan di antara para wakil ini bukanlah dalam dialog yang berusaha mencapai kedalaman sejauh mungkin, tetapi hanya hanya berkewajiban memelihara tradisi. Mereka harus memikirkan kebanyakan para penganut yang mengikuti tradisi atau agama itu. Mereka harus menemukan cara-cara untuk bertolernansi, bekerja sama dan memahami. Mereka harus memecahkan problem-problem praktis dan dekat.

Kedelapan: “perjumpaan agama dalam iman, harapan dan kasih”. Sekalipun peristilahan ini bernada Kristiani maknanya bersifat universal dengan *iman*, dimaksudkan sebagai suatu sikap yang melampaui data sederhana dan juga perumusan dogmatis dari pengakuan yang berbeda-beda. Sikap ini menyentuh pemahaman, sekalipun dalam kata-kata dan konsep-konsep berbeda. Kita tidak membicarakan sistem-sistem, melainkan realitas dan cara realitas ini menyatakan diri sehingga memberi arti bagi pasangan dialog kita. Dengan *harapan*, dipahami sebagai sikap mengharapkan yang melampaui segala harapan, dapat melompati tidak hanya hambatan awal kemanusiaan kita, tetapi juga melompati segala bentuk pandangan yang semata-mata duniawi dan memasuki jantung dialog, seolah-olah didesak

dari atas untuk menjalankan tugas suci. Dengan *cinta*, akhirnya, dimaksudkan sebagai gerak hati, kekuatan yang mendorong kita kepada sesama dan membimbing kita untuk menemukan dari mereka apa yang kurang pada diri kita.

Pada tingkat praktis, perjumpaan agama atau dialog dibutuhkan, paling tidak, tiga berikut.

Pertama: “persiapan yang sama”. Untuk perjumpaan ini dari kedua belah pihak dan ini berarti persiapan kultural dan teologal. Setiap dialog, termasuk dialog agama, bergantung pada panggung budaya dari pelaku-pelaku dialog. Mengabaikan perbedaan budaya yang melahirkan kepercayaan agama berbeda-beda sama dengan menghendaki kesalahpahaman yang terelakkan. Fungsi pertama dialog adalah menemukan dasar agar dialog dapat dilakukan dengan benar.

Kedua: ada “kepercayaan timbal balik” yang nyata antara mereka yang terlibat dalam perjumpaan. Tak ada satu pihak pun “menyembunyikan” keyakinan pribadinya.

Ketiga: “permasalahan yang berbeda-beda” (teologis, praktis, institusional, dan sebagainya) harus secara cermat dibedakan agar tidak terjadi kekacauan.¹¹

A. Mukti Ali¹² memberikan petunjuk praktis pula berkenaan dengan rencana atau persiapan dialog antarpemeluk agama, sehingga tercapai sasaran dan tujuan berdialog, yakni:

1. memahami elemen-elemen yang sama dan berbeda dalam setiap agama, sejarah, dan perbedaannya;
2. menghormati integritas agama dan kebudayaan orang lain;
3. memberikan sumbangan yang nyata untuk kehidupan antaragama yang harmonis;
4. mengukuhkan komitmen bersama untuk berusaha menciptakan kehidupan

yang berkeadilan sosial, dan menggiatkan pembangunan negeri kita yang sedang membangun;

5. berusaha bersama untuk memperkaya kehidupan spiritual dan agamis;

Selain itu, setiap peserta dialog harus menjauhi:

1. perbedaan yang tidak wajar terhadap ajaran suatu agama dengan yang lainnya, atau membuat karikatur terhadap ajaran agama lain;
2. usaha apapun untuk memaksakan penyelesaian yang sinkretik;
3. usaha terselubung untuk saling memindahkan agama orang lain dari agama yang dipeluk;
4. koeksistensi yang statis;
5. sikap permusuhan terhadap tetangga yang bukan seagama dengan kita.

Ada beberapa alasan dan tujuan perlu dilakukan dialog antargama, antara lain ada alasan-alasan sosiologis dan teologis. Alasan-alasan sosiologis antara lain berikut ini.

1. Pluralisme agama di dunia adalah suatu kenyataan yang makin lama makin jelas kelihatan karena makin mudahnya berkomunikasi.
2. Semakin tinggi keinginan untuk mengadakan hubungan dengan lainnya. *Isolationisme* selain harus ditinggalkan, juga tidak mungkin dilakukan. Apalagi aspek kesamaan antarkelompok umat manusia dan agama yang satu dengan yang lain semakin diakui dan dirasakan daripada apa yang memisahkannya.
3. Dialog antaragama membantu setiap peserta untuk tumbuh dalam kepercayaannya sendiri, manakala ia berjumpa dengan orang yang berlainan agama dan bertukar pikiran tentang berbagai keyakinan dan amalan yang diyakini dan diamalkan oleh masing-

masing pemeluk agama.

4. Selain nilai positif bagi individu dalam dialog, terdapat pula saling memperkaya antara agama-agama yang dipeluk oleh orang-orang yang mengambil bagian dalam dialog. Mislanya, dalam dialog antaragama, Islam dapat menyumbangkan pada agama lain peningkatan inspirasi dan universalitas.
5. Dialog antaragama dapat membantu untuk meningkatkan kerja sama di antara para penduduk suatu negeri, sehingga dalam kondisi saling menghargai, keadilan, perdamaian dan kerjasama yang bersahabat, semua orang dapat membangun negeri.¹³

Adapun alasan-alasan teologis, antara lain berikut ini.

1. Seluruh umat manusia hanya mempunyai satu asal, yaitu Tuhan, dan diciptakan untuk tujuan akhir yang sama, yaitu Tuhan sendiri. Oleh karena itu, hanya ada satu rencana Tuhan bagi setiap manusia ini, satu asal dan satu tujuan. Perbedaan itu memang ada, tetapi dibandingkan dengan persamaan-persamaan yang begitu banyak dan fundamental, perbedaan-perbedaan itu tidak begitu penting.
2. Semua umat manusia adalah satu, dan kesatuan inilah yang mendorong manusia untuk meningkatkan perdamaian universal.
3. Karena alasan-alasan teologis inilah, agama-agama mengambil sikap positif terhadap agama-agama yang bukan agamanya sendiri. Dan hal ini bisa dilakukan dengan dialog dan kerjasama dengan para pengikut agama lain untuk bersama-sama mengenal, memelihara, dan meningkatkan perbuatan-perbuatan spiritual dan moral yang terdapat pada orang-orang yang beragama lain, juga

nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat dan kebudayaan mereka.

4. Dialog antaragama bukan merupakan tindakan akademis saja, ia bukan merupakan diskusi filosofis dan teologis; ia merupakan perbuatan agama.
5. Dialog adalah usaha untuk keselamatan, dan itu adalah bagian dari tujuan total dari agama.¹⁴

A. Mukti Ali memberi bentuk-bentuk dialog antaragama yang dapat dan bisa dilakukan, di antaranya berikut ini.

1. *Dialog Kehidupan*

Pada bentuk ini, orang dari berbagai macam agama dan bekerjasama untuk saling memperkaya kepercayaan dan keyakinannya masing-masing, dengan melakukan nilai-nilai dari agama masing-masing tanpa diskusi formal. Hal ini terjadi pada keluarga, sekolah, angkatan bersenjata, rumah sakit, industri, kantor dan negara. Juga dialog antar kebudayaan, karena kebudayaan itu dipengaruhi oleh agama.

2. *Dialog dalam Kegiatan Sosial*

Yang dimaksud dialog antargama adalah bertujuan meningkatkan harkat umat manusia dan pembebasan integral dari umat manusia. Pelbagai macam pemeluk agama dapat mengadakan kerja sama dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan, dalam meningkatkan kehidupan keluarga, dalam proyek bersama untuk membantu rakyat yang menderita dari kekeringan, kemiskinan, kekurangan makan, dan terutama meningkatkan keadilan dan perdamaian.

3. *Dialog Komunikasi Pengalaman Agama*

Bentuk ketiga dari dialog antaragama adalah mengambil bentuk komunikasi pengalaman agama, doa, dan meditasi. Dialog semacam ini dapat disebut sebagai dialog intermonastik, misalnya, ada pertapa-pertapa Katolik dan

pertapa-pertapa Budha. Untuk beberapa minggu lamanya, mereka menginap di pertapaan lainnya supaya memperoleh pengalaman keyakinan untuk mempelajari kehidupan sehari-hari, seperti cara ereka berpuasa, berdoa, membaca kitab suci, meditasi, dan kerja lainnya. Sudah tentu, dialog *intermonastik* ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Ia dapat dilakukan oleh para pemimpin agama saja atau oleh orang yang ingin mengetahui kehidupan pemimpin-pemimpin agama lain.

4. *Dialog untuk Doa Bersama*

Bentuk dialog seperti ini sering dilakukan dalam pertemuan-pertemuan agama internasional, yang didatangi oleh pelbagai kelompok agama yang beragama. Setiap orang dapat berdoa dengan cara dan keyakinannya masing-masing, misalnya tentang doa perdamaian dunia, yang dilakukan secara bersama-sama. Dialog seperti ini pernah dilakukan pada tanggal 27 Oktober 1986 di Assisi, yakni "Hari Doa Sedunia untuk Perdamaian".

5. *Dialog Diskusi Teologis*

Dialog antargama dalam bentuk kelima ini, yaitu para ahli agama tukar menukar informasi tentang keyakinan, kepercayaan, dan amalan-amalan agama masing-masing, dan berusaha untuk mencari saling pengertian dengan perantaraan diskusi itu. Dialog antaragama seperti ini sering dilakukan dalam dialog-dialog internasional, baik di Barat maupun di Timur, juga di Indonesia.

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar dan norma-norma teologis maupun etis, dialog antarumat beragama adalah penting, dan yang harus terus menerus dilakukan adalah adanya pembinaan dan dialog internal masing-masing pemeluk agama. Pembinaan adalah tugas para tokoh agama bersama-

sama dengan pemerintah. Keduanya memiliki peran yang sama penting dalam kehidupan beragama, sekalipun memiliki fungsi dan bentuk berbeda.

Demikian pula, dialog internal keagamaan penting dilakukan untuk memelihara kebersamaan (kerukunan). Adanya dialog tidak selamanya berkonotasi tidak adanya kerukunan, atau sekedar memelihara kerukunan, tetapi juga untuk memberikan kesadaran kepada umat beragama tentang cara dan sikap memahami agamanya; dan bagaimana pula cara dan sikap dalam berhubungan dengan umat beragama yang berbeda, sehingga tampak peningkatan wawasan berpikir dan wawasan pengetahuan keagamaan serta meningkatkan kebersamaan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Pentingnya dilakukan pembinaan keagamaan adalah berangkat dari kenyataan, bahwa jika ditelusuri, ada dua faktor yang pada umumnya menjadi masalah sentral dan strategis dalam pembinaan keagamaan: Faktor *internal* dan *eksternal*.

Secara internal, dapat kita lihat beberapa kenyataan yang selalu memunculkan masalah-masalah itu, antara lain berikut ini.

1. Doktrin dan pemahaman keagamaan yang melahirkan suatu ideologi, sehingga pemahaman keagamaan menjadi parsial. Muncul sikap dan cara berpikir *jabari* maupun *qodari* (di lingkungan umat Islam);
2. Kemiskinan dan etos kerja; faktor ini pun mempengaruhi dinamika hubungan beragama. Dalam hal ini, paling tidak, keduanya diperlukan untuk mengembangkan manajemen kelembagaan umat.
3. Dinamika politik umat Islam, dengan indikasi adanya kesadaran berpolitik, terutama saat jatuhnya Orde Baru dan muncul reformasi.

Adapun faktor-faktor eksternal, pada

umumnya berawal dari saling mencurigai, pengaruh dinamika politik yang sedang berkembang, dan ketidaktahuan tentang agamanya maupun agama orang lain.

Memang, disadari bahwa pemahaman keagamaan didasarkan atas pilihan bebas. Dalam sejarah umat Islam, misalnya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa orang Islam memaksa orang lain untuk menjadi muslim. Seorang filosof Inggris, Bertrand Russel, menyatakan bahwa keberhasilan umat Islam menaklukkan suatu negeri adalah karena toleransi umat Islam terhadap rakyat yang ditaklukkannya. Hanya saja, dalam kehidupan bermasyarakat atau juga beragama, konflik memang selalu ada. Oleh karena itu, yang penting adalah bagaimana meredam atau menghindari terjadi konflik.

Dalam konteks itu, dua hal yang perlu mendapat perhatian kita adalah pencegahan dan penanganan konflik melalui “managemen konflik”; dan kedua, “menumbuhkan kesadaran beragama”. Managemen konflik dibutuhkan dalam rangka meredam lebih meluasnya konflik dan sebagai satu cara untuk memudahkan pembinaan keagamaan menuju kesadaran beragama. Pembinaan kesadaran beragama bisa dilakukan melalui pembinaan rutin dengan memunculkan tema-tema, misalnya bahwa “agama mengajarkan toleransi”, “agama itu inklusif”, termasuk tema-tema kemanusiaan lainnya, seperti masalah kemiskinan. Oleh karena itu, dua hal tersebut membutuhkan kerja sama antarpada tokoh agama, unsur-unsur masyarakat lainnya, dan pemerintah.

Kesimpulan

Dialog dan kerukunan antarumat beragama merupakan dua proses komunikasi kerjasama antarumat beragama yang tidak dapat dipisahkan. Sebab, salah satu bagian dari kerukunan antarumat

beragama adalah perlu dilakukannya dialog antaragama. Dalam rangka kerukunan, setiap penganut agama sudah tentu harus memahami agamanya dan menyadari pula keragaman dan perbedaan dalam beragama. Dalam kajian-kajian teoretis, untuk memahami keragaman dan perbedaan kepeganutan, paling tidak, terdapat tiga pendekatan yang sering digunakan: Pendekatan *teologis*, *politis* dan *sosial kultural*. Aplikasi dari pendekatan-pendekatan tersebut jelas sangat diperlukan adanya suatu dialog. Oleh karena itu, diperlukan beberapa prinsip dasar dalam melakukan dialog antaragama. Prinsip-prinsip dasar ini dapat berasal dari norma masing-masing agama, bisa juga berasal atas dasar pengalaman pribadi dari manusia beragama, baik pengalaman langsung maupun pengalaman atas dasar memahami fenomena beragama.

- ⁴ Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*, Bina Ilmu, Surabaya, 1979, hlm. 291.
- ⁵ *Ibid.*, hlm. 314
- ⁶ *Ibid.*, hlm. 330
- ⁷ Lihat; Budy Munawar Rachman: “Resolusi Konflik Agama dan Masalah Klaim Kebenaran”, salah satu kumpulan tulisan yang terdapat dalam buku berjudul: *Dari Keseragaman Menuju Keberagaman, Wacana Multikultural dalam Media*, Sandra Kartika dan M. Mahendra (Editor), Lembaga Studi Pers & Pembangunan, Jakarta, 1999, hlm. 129.
- ⁸ *Ibid.*, hlm. 130
- ⁹ Ismail R. Faruqi, *Pengalaman Keagamaan dalam Islam*, Terjemahan, PLP2M, Yogyakarta, 1985, hlm. 120-121.
- ¹⁰ Raimundo Panikkar, *Dialog Intra Religius*, Terjemahan Kelompok Studi Filsafat Driyarkara, Kanisius, Yogyakarta, 1994, hlm. 64-74.
- ¹¹ *Ibid.*, hlm. 76.
- ¹² A. Mukti Ali dalam Burhanuddin Daya & Beck (red), *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda*, INIS, Jakarta, 1992, hlm. 231.
- ¹³ *Ibid.*, hlm. 215-216.
- ¹⁴ *Ibid.*, hlm. 216-218.

Endnotes

- ¹ Nurcholish Madjid, Dalam Pengantar, George B. Grose & B.J. Hubbard (ed), *Tiga Agama Satu Tuban*, Terjemahan Santi Indra Astuti, Mizan, Bandung, 1998, hlm. xviii
- ² A. Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, MIzan, Bandung, Cetakan XI, 1999, hlm. 83.
- ³ Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia, Pengalaman Islam*, Paramadina, Jakarta, 1999, hlm. 59.

Tentang Penulis

Khotimah, dosen tetap pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau menyelesaikan Studi Program S1 di IAIN SUSQA Pekanbaru pada Studi Perbandingan Agama Tahun 1999. S2 di IAIN SUSQA Pekanbaru konsentrasi Perkembangan Islam Regional Asia Tenggara, tahun 2002.